



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

 www.dkpp.go.id

 [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

 [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

 [@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

 [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI)

RILIS DKPP

TERBUKTI MELANGGAR KEPP, DKPP BERHENTIKAN SEPULUH PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada sepuluh penyelenggara Pemilu karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI Imam Khaiorullah selaku Ketua merangkap Anggota PPK Kecamatan Palengaan, Teradu VII Holwani, Teradu VIII Riyan Hidayat, Teradu X Muhammad Ali masing-masing selaku Anggota PPK Kecamatan Palengaan terhitung sejak putusan ini bacakan,” tegas Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan amar putusan perkara nomor 69-PKE-DKPP/V/2024.

Sanksi Pemberhentian Tetap juga dijatuhkan DKPP kepada Abdus Suhud, Muyassir, Ali Mahrus, Idam Sugianto, Edi Trisatrio selaku Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Proppo selaku Teradu X sampai XV dalam Perkara yang sama.

DKPP menilai bahwa Teradu X sampai XV sudah bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik ditingkat kecamatan dengan melakukan kesalahan perhitungan pada 14 TPS di Kecamatan Palengaan dan 1 TPS di Kecamatan Proppo.

“Teradu VI sampai XV dalam melakukan perhitungan suara ditingkat Kecamatan Palengaan dan Proppo bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf F PKPU Nomor 5 tahun 2024,” ungkap Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Selain itu dalam sidang pembacaan putusan kali ini DKPP juga mengeluarkan ketetapan yaitu Pengaduan Pengadu Batal Demi Hukum dan Tidak Dapat Dilanjutkan ke Tahap Putusan terhadap perkara nomor 64-PKE-DKPP/V/2024.

“Pengadu mencabut aduan dan Majelis tidak melakukan sidang pemeriksaan sehingga Tidak Memenuhi Syarat sebagai pelanggaran KEPP,” pungkas Ratna Dewi Pettalolo.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tujuh perkara yang melibatkan 45 Teradu. Sanksi yang dijatuhkan yakni Pemberhentian Tetap (10), Pengaduan Batal (7), dan Pengaduan Tidak Dapat Diterima (1). Sedangkan 27 Teradu lainnya direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo. Diddampingi oleh Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA SENIN, 22 JULI 2024

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	50-PKE-DKPP/III/2024	1. Arie Setiawan Mokodompit 2. Yunita Mokodompit (Anggota dan Ketua Bawaslu Kota Kotamobogu) 3. Egindranata Kotampi (Staf Bawaslu Kota Kotamobogu)	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi;
2.	64-PKE-DKPP/V/2024	1. Hasyim Asy'ari; 2. Betty Epsilon Idroos; 3. Mochammad Afifuddin; 4. Parsadaan Harahap; 5. Yulianto Sudrajat; 6. Idham Holik; 7. August Mellaz. (Ketua dan Anggota Ketua KPU RI)	Pengaduan Pengadu Batal Demi Hukum dan Tidak Dapat Dilanjutkan ke Tahap Putusan (Pengadu mencabut aduan dan Majelis tidak melakukan Sidang Pemeriksaan sehingga Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pelanggaran KEPP)
3.	67-PKE-DKPP/V/2024	Riswahyu Raharjo (Anggota KPU Kabupaten Wonosobo)	Pengaduan Para Pengadu Tidak Dapat Diterima (Teradu sebelumnya sudah diberhentikan oleh KPU)
4.	69-PKE-DKPP/V/2024	1. Muhammad Halili; 2. Fathor Rachman; 3. Ibnun Hasan Mahfud; 4. Moh. Amiruddin; 5. Moh. Mansur; (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan) 6. Imam Khaiorullah; 7. Holwani; 8. Riyan Hidayat; 9. Sulaiman; 10. Muhammad Ali; (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Palengaan) 11. Abdus Suhud;	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi; 6. Pemberhentian Tetap; 7. Pemberhentian Tetap; 8. Pemberhentian Tetap; 9. Pemberhentian Tetap (Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu); 10. Pemberhentian

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		12. Muyassir; 13. Ali Mahrus; 14. Idam Sugianto; 15. Edi Trisatrio (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Proppo)	Tetap; 11. Pemberhentian Tetap; 12. Pemberhentian Tetap; 13. Pemberhentian Tetap; 14. Pemberhentian Tetap; 15. Pemberhentian Tetap
5.	71-PKE-DKPP/V/2024	1. Addy Imansyah 2. Siti Aisyah 3. Aliyanto (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang) 4. Muhalli 5. Morsidi Ali Syahbana 6. Purnidi Sutrisno (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang) 7. Pusilan (Ketua PPK Kecamatan Tambelangan)	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi; 6. Rehabilitasi; 7. Rehabilitasi.
6.	82-PKE-DKPP/V/2024	1. Mishart A. Manoppo; (Ketua KPU Kota Kotamobogu) 2. Miranti Menangin; (Ketua PPK Kotamobogu Utara) 3. Fadli Korompot; (PPS Desa Pontodan) 4. Sriwahyuni Mokodongan; (PPS Kelurahan Genggulang) 5. Yunita Mokodompit (Ketua Bawaslu Kotamobagu)	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi.
7.	98-PKE-DKPP/V/2024	1. Mudafir Hi Taher Lambutu 2. Rahmawati 3. Sukardi Litte 4. Ahmad Fauto (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur) 5. Suratman Kadir 6. Alherfa Barmawi	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi; 6. Rehabilitasi; 7. Rehabilitasi;

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		7. Susana Cory Rontinsulu (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur	

Sekretaris DKPP,

}{ttd}

Dr. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001